

LAPORAN KINERJA BPBD KAB MOJOKERTO TAHUN 2025



(0321) 325470
Jl. Raya Jabon Mojoanyar No.188
bpbd.mojokertokab.go.id

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Kata Pengantar

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran ini disusun sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran kinerja secara optimal agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ini mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Amin ya robbal alamiin.

Mojokerto, 29 Februari 2026

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Mojokerto



Ir.Rinaldi Rizal Sabirin,S.T.,M.BA.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP 197910102009011011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2026)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,825	0,73	88%
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%	20%	100%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2026 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

N O	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45 (A)	81,84	101%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,10%	95,64%	98%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	81,14 (tinggi)	81,84 (tinggi)	101%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	1 Inovasi	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai SPM	65%	63%	96,9%
		Persentase Penanganan Non-Kebakaran sesuai Standar	100%	100%	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,62	0,73	117,7%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,45	81,84	100,5%

Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp **10.708.200.247,00** atau **95,61%** dari total pagu anggaran sebesar Rp**11.200.200.325,00**

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Umum	2
I.3 Isu-isu Strategis	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 8
II.1 Penjenjangan Strategis.....	8
II.2 Indikator Kinerja Utama	23
II.3 Perjanjian Kinerja.....	25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 28
III.1 Pengukuran Kinerja	28
III.2 Analisis Kinerja	30
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya	43
III.4 Akuntabilitas Anggaran	47
 BAB IV PENUTUP.....	 49
 LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis

Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel II.4 Anggaran Per Program

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2026)

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

Daftar Gambar

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan dokumen yang berisi ikhtisar pencapaian kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program serta kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah, sekaligus sebagai sarana transparansi kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan perjanjian kinerja, pengumpulan dan pengolahan data kinerja, pengukuran serta analisis capaian indikator kinerja, hingga evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Pada Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto menyusun dua Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang mengacu pada periode perencanaan 2021–2026 serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun seiring dengan ditetapkannya periode perencanaan baru 2025–2029. Kondisi tersebut mencerminkan adanya proses transisi perencanaan yang tetap harus dijaga kesinambungan dan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan Kinerja memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), serta Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja merupakan hasil implementasi langsung dari perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi instrumen untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, Laporan Kinerja juga berperan strategis sebagai bahan evaluasi dan umpan balik bagi perencanaan kinerja pada periode selanjutnya. Hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, baik pada Perjanjian Kinerja periode 2021–2025 maupun Perjanjian Kinerja Perubahan periode 2025–2029. Capaian tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bencana di masa yang akan datang. Dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang prima serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

I.2 Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati

setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

Jumlah ASN :

NO.	JABATAN	L	P	TOTAL
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2	Jabatan Administrator	4	0	4

3	Jabatan Pengawas	1	0	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	3	1	4
5	Jabatan Pelaksana	28	0	28
	JUMLAH	37	1	38

Jumlah CPNS dan PPPK

NO.	JABATAN	L	P	TOTAL
1	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	-	1	1
2	Pemadam Kebakaran Pemula	5	0	5
3	Penata Layanan Operasional	1	0	1
4	Operator Layanan Operasional	1	0	1
	JUMLAH	7	1	8

Jumlah PPPK Paruh Waktu

NO.	URUSAN	L	P	TOTAL
1	Jasa Tenaga Pembantu Pengadministrasi	3	2	5
2	Jasa Tenaga Kebersihan	2	-	2
3	Jasa Tenaga Pembantu Petugas Operator Pada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	8	0	8
4	Jasa Tenaga Pembantu Operasional Pemadam Kebakaran	24	-	24
	JUMLAH	37	2	39

Sarana Prasarana Pendukung pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor BPBD Kab. Mojokerto
2. 2 Unit POS DAMKAR
3. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4
4. Sarana prasarana penyelamatan seperti perahu, RIG, tenda, chainsaw dan lain - lain
5. sarana prasarana kantor seperti laptop, PC, printer, filing cabinet dan lain-lain

I.3 Isu-isu Strategis

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja yang dihadapi BPBD Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya saat ini adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya desa tangguh bencana di seluruh daerah rawan bencana.
2. Belum tersedianya sistem peringatan dini / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.
3. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.
4. Belum tersedianya rencana kontinjensi per jenis bencana yang terintegrasi dan komprehensif.
5. Pos pemadam kebakaran yang dimiliki BPBD Kabupaten Mojokerto saat ini hanya berada di 2 lokasi (Kec. Mojosari dan Kec. Mojoanyar) yang harus melayani seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas 692,15 km².

Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Mojokerto, minimal ada 7 (tujuh) pos pemadam kebakaran yang menjadi prioritas

pembangunan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Mojokerto untuk dapat memenuhi waktu tanggap 15 menit dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota.

6. Armada pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum mencukupi (hanya memiliki 7 armada). Dari jumlah tersebut 2 unit diantaranya tidak dapat berfungsi. Jumlah armada yang dibutuhkan menyesuaikan dengan jumlah pos pemadam kebakaran / WMK yang ada. Sehingga jika seharusnya terdapat 7 pos pemadam kebakaran / WMK maka jumlah armada yang harus dimiliki sebanyak 14 unit.
7. Jumlah personil pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum sesuai standar, baik dari jumlah maupun kompetensi. Saat ini BPBD Kabupaten Mojokerto hanya memiliki 38 personil dan hanya 4 personil yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemadam Tingkat 1. Sedangkan jumlah personil pemadam kebakaran yang harus dimiliki adalah sebanyak 21 orang pada setiap pos.
8. Peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum mencukupi.

Sedangkan isu-isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Mojokerto saat ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
2. Penguatan mitigasi struktural dalam penanggulangan bencana.
3. Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.
4. Perencanaan sistem proteksi kebakaran berdasarkan penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
5. Penerapan standardisasi dan sertifikasi kompetensi SDM penanggulangan bencana dan personil pemadam kebakaran.
6. Pengkajian dan penentuan klasifikasi proteksi kebakaran dari konstruksi gedung perkantoran, industri, perdagangan dan kompleks pemukiman.
7. Pengembangan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran.
8. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam peningkatan kinerja

penanggulangan bencana dan kebakaran.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKj BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatan. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Pada Tahun 2025 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki 2 (dua) perjenjangan strategis, yaitu berdasarkan visi Kepala Daerah periode tahun 2021-2026 dan periode tahun 2025-2029.

Perjenjangan Strategis berdasarkan visi Kepala daerah periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan.
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada periode ini mendukung mensukseskan misi sebagai berikut : :

Misi ke 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan.

Misi ke 4 : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
2. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.

Perencanaan Strategis berdasarkan visi Kepala daerah periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dimaksud, dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025–2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman Masyarakat.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan pendidik, serta Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.
3. Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto terkait dan mendukung 2 misi Bupati Mojokerto, yaitu :

1. **Misi ke 1** : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman Masyarakat.
2. **Misi ke 4** : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Mojokerto dan memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Mojokerto maka tujuan dari BPBD Kabupaten Mojokerto adalah

“Meningkatkan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran”

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2029 adalah **Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran.**

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis

Periode Penjenjangan Strategis Tahun 2021-2026

Sasaran/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)(%)	0,825
[PROGRAM] 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana (%)	100,00
	Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap(%)	100,00
	Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana(%)	70,00

[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun(Orang)	30,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00
[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana(%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani(Kegiatan)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya(Unit)	2,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota(Orang)	150,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana(Kawasan)	2,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk	8,00

	penanganan awal darurat bencana(Orang)	
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya(laporan)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(Kawasan)	100,00
[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana(Orang)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis(Orang)	8,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang)	30,00

Korban Bencana Kabupaten/Kota		
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota(Laporan)	1,00
[KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan)	4,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)(Orang)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan(Kegiatan)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat Daerah(nilai)	81,45
[PROGRAM] 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM PD(nilai)	100,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%(%)	100,00

[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	3,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	3,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	95,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	44,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN(%)	81,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar(%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	2,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12,00

Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
[KEGIATAN] 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar(%)	100,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(bulan)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah(Bulan)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	26,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	2,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	27,00
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Presentase Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk (%)	20,00
[PROGRAM] 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Persentase Penanganan kejadian Kebakaran sesuai waktu tanggap (%)	65,00

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
	Persentase Penanganan Non Kebakaran sesuai standar (%)	100,00
[KEGIATAN] 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah penduduk yang mendapat informasi dan edukasi dalam pencegahan kebakaran (%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran(Dokumen)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran(Orang)	45,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait(Unit)	6,00
[KEGIATAN] 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase bangunan gedung yang laik fungsi (%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran(Dokumen)	1,00
[KEGIATAN] 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran(%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan	2,00

	(SKKL) Setiap Tahunnya(Desa/Kelurahan)	
--	--	--

Periode Penjenjangan Strategis Tahun 2025-2029

Sasaran/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)(%)	0,61
[PROGRAM] 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	indeks kesiapsiagaan masyarakat(%)	60,00
	Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap(%)	100,00
	Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana(%)	70,00
[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun(Orang)	30,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00
[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana(%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani(Kegiatan)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya(Unit)	2,00

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota(Orang)	150,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana(Kawasan)	2,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana(Orang)	8,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya(laporan)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(Kawasan)	100,00
[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%)	100,00

[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana(Orang)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis(Orang)	8,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang)	30,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota(Laporan)	1,00
[KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan)	4,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)(Orang)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan(Kegiatan)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00

[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat Daerah(nilai)	81,45
[PROGRAM] 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM PD(nilai)	100,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%(%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	3,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	3,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	95,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	44,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN(%)	81,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar(%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	2,00

[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar(%)	100,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(bulan)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12,00
[KEGIATAN] 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah(Bulan)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	26,00

[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	2,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	27,00
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai SPM(%)	65,00
	Persentase Penanganan Non Kebakaran sesuai standar (%)	100,00
[PROGRAM] 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk (%)	20,00
	Presentase kejadian kebakaran dan Non Kebakaran yg ditindaklanjuti (%)	100,00
	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran (%)	90,00
	presentase sarana prasarana pencegahan kebakaran dan non kebakaran dalam kondisi baik (%)	90,00
[KEGIATAN] 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah penduduk yang mendapat informasi dan edukasi dalam pencegahan kebakaran (%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)	12,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran(Dokumen)	12,00

[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran(Orang)	45,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait(Unit)	6,00
[KEGIATAN] 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase bangunan gedung yang laik fungsi (%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran(Dokumen)	1,00
[KEGIATAN] 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran(%)	100,00
[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya(Desa/Kelurahan)	2,00

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki 2 (dua) Penjenjangan strategis, sehingga pada tahun ini terdapat 2(dua) indikator kinerja utama yaitu Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Penjenjangan strategis tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Penjenjangan strategis tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) yang telah terbentuk / Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) Prioritas yang harus dibentuk di Kab. Mojokerto X 100%	Ketersediaan WMK di Kabupaten Mojokerto	Rekapitulasi ketersediaan WMK BPBD Kab. Mojokerto
Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan bahaya kebakaran	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Nilai yang Perhitungannya didasarkan pada 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana yang didalamnya terdiri dari 13 sasaran dan 71 indikator	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto	Penyampaian hasil perhitungan IKD dari BPBD Kab/BPBD Prov/BNPB

KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	LHE Inspektorat
	1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Laporan Realisasi PD
	1.3	Indeks Profesionalitas ASN	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan inovasi PD

Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah			
-------------------------------------	--	--	--

Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Penjenjangan strategis tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Kebakaran Sesuai SPM}}{\text{Jumlah Seluruh Penanganan Kebakaran yang telah dilaksanakan}} \times 100\%$	BPBD Kab. Mojokerto
	Persentase Penanganan Non-Kebakaran Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Non-Kebakaran Sesuai Standar}}{\text{Jumlah Seluruh Penanganan Non-Kebakaran yang telah dilaksanakan}} \times 100\%$	BPBD Kab. Mojokerto
	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Nilai yang Perhitungannya didasarkan pada 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana yang didalamnya terdiri dari 13 sasaran dan 71 indikator	BPBD Provinsi Jawa Timur/BNPB
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Perjanjian Kinerja berdasarkan Penjenjangan periode 2021-2026

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,825
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2026 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

N O	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,10%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	81,14 (tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

Perjanjian Kinerja berdasarkan Penjenjangan periode 2025-2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai SPM	65%
		Persentase Penanganan Non-Kebakaran sesuai Standar	100%

2	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,62
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,45

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.4 Anggaran Per Program
berdasarkan Penjenjangan periode 2021-2026

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.049.199.000,00
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp2.097.466.345,00
3	Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp1.560.600.000,00

berdasarkan Penjenjangan periode 2025-2029

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.495.890.150
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 3.176.593.275
3	Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.527.716.900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Tabel III.1.a
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2026)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,825	0,73	88%
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%	20%	100%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2026 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

N O	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45 (A)	81,84	101%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,10%	95,64%	98%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	81,14 (tinggi)	81,84 (tinggi)	101%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	1 Inovasi	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

Tabel III.1.b
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALISASI				% CAPAI AN
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai SPM	65%				63%	96,9%

	Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase Penanganan Non-Kebakaran sesuai Standar	100%				100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,62				0,73	117,7 %
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,45				81,84	100,5 %

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai..

Formulasi perhitungan seluruh sasaran strategis dengan indikator kinerja dan seluruh kinerja lainnya dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) yang telah terbentuk / Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) Prioritas yang harus dibentuk di Kab. Mojokerto X 100%	Ketersediaan WMK di Kabupaten Mojokerto	Rekapitulasi ketersediaan WMK BPBD Kab. Mojokerto

Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan bahaya kebakaran	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Nilai yang Perhitungannya didasarkan pada 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana yang didalamnya terdiri dari 13 sasaran dan 71 indikator	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto	Penyampaian hasil perhitungan IKD dari BPBD Kab/BPBD Prov/BNPB
--	-------------------------------	---	--	--

KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	LHE Inspektorat
	1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Laporan Realisasi PD
	1.3	Indeks Profesionalitas ASN	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan inovasi PD

Realisasi Kinerja adalah sebagai berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,825	0,73	88%
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%	20%	100%

N O	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45 (A)	81,84	101%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,10%	95,64%	98%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	81,14 (tinggi)	81,84 (tinggi)	101%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	1 Inovasi	100%

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa peningkatan/penurunan kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan beserta alternatif solusinya adalah sebagai berikut :

1. Nilai IKD Kabupaten Mojokerto ditargetkan 0,825 akan tetapi realisasi capaian kinerja sesuai Rilis BNPB diperoleh nilai IKD Kab. Mojokerto 0,73 sehingga capaian kinerja atas nilai IKD adalah sebesar 88% . Hal ini disebabkan :
 - a. Jenis ancaman bencana di Kabupaten Mojokerto mengalami perubahan yang asalnya banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan

lahan, serta erupsi gunung berapi menjadi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung berapi, tanah longsor, likuifaksi. Intervensi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih belum dapat menghilangkan atau mengurangi jenis ancaman bencana tersebut.

- b. Adanya penyesuaian kebijakan dan refocusing kegiatan yang berdampak pada perubahan rencana pelaksanaan program
- c. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di lingkungannya

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi, yaitu:

- a. Melakukan penyesuaian kebijakan serta refocusing kegiatan yang berdampak pada perubahan rencana pelaksanaan program, guna memastikan tetap tercapainya sasaran strategis organisasi
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi pada stakeholder dalam penanggulangan bencana
 - c. Melakukan koordinasi dan komunikasi pada stakeholder terkait atas pentingnya sosialisasi, edukasi dan mitigasi bencana
2. Indikator Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) diperoleh dengan membandingkan Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) yang telah terbentuk dengan Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) Prioritas yang harus dibentuk di Kab. Mojokerto. Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) Prioritas yang harus dibentuk di Kab. Mojokerto sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang telah ditetapkan adalah 10 WMK

WMK yang harus ada sesuai RISPK adalah :

1. WMK PACET
2. WMK JATIREJO
3. WMK MOJOSARI
4. WMK NGORO
5. WMK SOOKO
6. WMK JETIS
7. WMK TROWULAN
8. WMK TRAWAS

9. WMK MOJOANYAR

10. WMK PUNGGING.

Pada TA. 2025 WMK ditargetkan sebesar 20%, realisasi capaian kinerja sebesar 20% atau 100%. Hal ini disebabkan dari 10 WMK hanya terbangun 2 WMK yaitu di Mojoanyar dan Mojosari.

Pencapaian kinerja pada indikator ini dari tahun ke tahun tidak ada perubahan atau tetap di angka 20%. Dikarenakan pembangunan WMK yang direncanakan belum mendapat porsi cukup atas ketersediaan anggaran, SDM, sarana dan prasarana serta komitmen peningkatan terbentuknya WMK.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi, yaitu:

1. Mengusulkan alokasi anggaran atas pembentukan WMK
2. Membentuk relawan pemadam kebakaran pada kawasan prioritas terlebih dahulu yaitu kawasan kumuh yang telah ditetapkan sehingga potensi kebakaran masih di kawasan kumuh dapat diminimalisir
3. Memberikan pelatihan dan bantuan sarana prasarana kepada desa yang telah dibentuk relawan pemadam kebakaran sehingga tersedia sumber daya manusia yang aktif dan berkualitas dalam membantu penanganan kebakaran
3. Indikator Nilai SAKIP perangkat daerah diperoleh dari rilis nilai SAKIP BPBD oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. **Pada TA. 2025 ditargetkan sebesar 81,3, realisasi capaian kinerja sebesar 81,84 atau 101%.** Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700/492.3/416-034/2025 tanggal 15 September 2025 terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto. Atas Laporan Hasil Evaluasi tersebut, sudah ditindaklanjuti dengan surat kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 360/2606/416-205/2025 tanggal 24 Desember 2025.
4. Indikator realisasi anggaran perangkat daerah yang tercapai diperoleh dari membandingkan realisasi anggaran BPDB Kab. Mojokerto dengan total anggaran pada BPDB Kab. Mojokerto. **Pada TA. 2025 ditargetkan sebesar 94,5%, realisasi capaian kinerja sebesar 95,6% atau 101%.** Hal ini disebabkan dari total anggaran Rp **10.708.200.247,00** terealisasi sebesar Rp **11.200.200.325,00**. hal ini disebabkan karena pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara intens tiap bulan sehingga apa yang direncanakan sesuai seperti yang direncanakan.

5. Indikator Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari Rilis IP ASN dari rekapitulasi data ASN BPBD di My SAPK pada tahun evaluasi. **Pada TA. 2025 ditargetkan sebesar 82, realisasi capaian kinerja sebesar 81,45 atau 99%.** Hal ini karena dari ada beberapa ASN yang masih kurang dalam mendapat nilai Kompetensi. Kedepannya akan lebih disosialisasikan kembali kepada seluruh ASN supaya giat dalam mengikuti peningkatan kompetensi baik berupa sosialisasi/webinar/bimtek maupun pelatihan.
6. Indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan diperoleh dari jumlah inovasi yang dikomitmenkan dibuat atau dikembangkan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto. Pada TA. 2025 ditargetkan sebesar 1 inovasi, realisasi capaian kinerja sebesar 1 inovasi . hal ini disebabkan pada tahun 2025 BPBD hanya dapat mengembangkan aplikasi SIMONA. Kedepannya akan dirilis aplikasi baru guna meningkatkan kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto yang direncanakan dengan nama MOJO MANDALA

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki kinerja dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Kebakaran Sesuai SPM}}{\text{Jumlah Seluruh Penanganan Kebakaran yang telah dilaksanakan}} \times 100\%$	BPBD Kab. Mojokerto
	Persentase Penanganan Non-Kebakaran Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Non-Kebakaran Sesuai Standar}}{\text{Jumlah Seluruh Penanganan Non-Kebakaran yang telah dilaksanakan}} \times 100\%$	BPBD Kab. Mojokerto
	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Nilai yang Perhitungannya didasarkan pada 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana yang didalamnya terdiri dari 13 sasaran dan 71 indikator	BPBD Provinsi Jawa Timur/BNPB

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat
---	-------------	--	------------------------------------

Realisasi Kinerja adalah sebagai berikut :

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai SPM	65%	63%	96,9%
		Persentase Penanganan Non-Kebakaran sesuai Standar	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,62	0,73	117,7%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,45	81,84	100,5%

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa peningkatan/penurunan kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan beserta alternatif solusinya adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator “Persentase Penanganan Kebakaran sesuai SPM” pada tahun 2025 hanya tercapai 96,9% dikarenakan dari 107 kejadian kebakaran 67 kejadian tertangani sesuai waktu tanggap (15 menit) dan 40 kejadian tertangani melebihi waktu tanggap. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang telah dialami, yaitu:
 - Keterlambatan laporan dari masyarakat

- Masih kurangnya pembentukan POS Pemadam Kekabaran yang tersebar di Kabupaten Mojokerto
- Lalu Lintas yang padat dalam Penanganan kebakaran di beberapa wilayah Kabupaten Mojokerto
- Minimnya pemahaman tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahan

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi, yaitu:

- Pembentukan realwan pemadam kebakaran di daerah kumuh
- Melakukan sosialisasi dan edukasi penanganan kebakaran di daerah kumuh
- Meningkatkan pemahaman tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahan di masyarakat
- Monitoring secara rutin atas kondisi kendaraan secara berkala sehingga siap dalam penanganana kebakaran

2. Capaian indikator “Persentase Penanganan Non-Kebakaran sesuai Standar” di tahun 2025 sebesar 100% Angka capaian tersebut didapatkan dari penanganan penyelamatan non kebakaran sejumlah 623 kejadian telah terselesaikan 623 kejadian sesuai standar. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- komitmen dari semua bagian;
- Pemahaman atas Penanganan Non-Kebakaran sesuai Standar yang baik

3. Nilai IKD Kabupaten Mojokerto ditargetkan 0,62 akan tetapi realisasi capaian kinerja sesuai Rilis BNPB diperoleh nilai IKD Kab. Mojokerto 0,73 sehingga capaian kinerja atas nilai IKD adalah sebesar 117,7% . Hal ini disebabkan :

- Pada awal penyusunan dokumen perencanaan 2025-2029 telah diperhitungkan penambahan jenis ancaman,bahaya dan kerentanan yang akan terjadi pada 2025-2029
- Berhasilnya pemfokusan anggaran atas refocusing kegiatan sehingga tidak begitu berdampak pada perubahan rencana pelaksanaan program
- Sistem koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana berjalan dengan baik

4. Indikator Nilai SAKIP perangkat daerah diperoleh dari rilis nilai SAKIP BPBD oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. **Pada TA. 2025 ditargetkan sebesar 81,3, realisasi capaian kinerja sebesar 81,84 atau 101%.** Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700/492.3/416-034/2025 tanggal 15 September 2025 terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanuti oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto. Atas Laporan Hasil Evaluasi tersebut, sudah ditindaklanjuti dengan surat kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 360/2606/416-205/2025 tanggal 24 Desember 2025.

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
Berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi						Targ et Akhir Rens tra	Prog res Capa ian
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,61	0,69	0,825	0,76	0,79	0,73	0,825	88%
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	N/A	81,3	81,63	81,3	81,84	81,3	101%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	N/A	N/A	95%	93%	97,02%	95,6%	95%	101%
		Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	81	71	80	81	81	100%

4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	N/A	N/A	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
---	---	---	-----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Berdasarkan dokumen perencanaan periode 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi						Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai SPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63%	65%	97%
		Persentase Penanganan Non-Kebakaran sesuai Standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,61	0,69	0,70	0,76	0,79	0,73	0,67	85%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	N/A	N/A	84	81,63	81,3	81,84	81,3	101%

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto rata rata terus mengalami peningkatan dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Realisasi Kinerja pada level Program dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :
Sesuai dokumen perencanaan tahun 2021-2026

NO	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra 2021-2026	Program Renstra 2021-2026	Indikator Kinerja	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP perangkat Daerah	n/a	84	81	81,3	81,84
			Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	n/a	95	93	97	95
			Indeks profesionalitas ASN	n/a	81	71	80	81
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	n/a	1	1	1	1
3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana	20%	20%	20%	20%	20%
			Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%

4	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap	65%	65%	65%	66%	63%
			Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (non kebakaran)	100%	100%	100%	100%	100%

Sesuai Dokumen Perencanaan 2025-2029

NO	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra 2021-2026	Program Renstra 2021-2026	Indikator Kinerja	Realisasi	
				2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM perangkat Daerah	n/a	100
2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	indeks kesiapsiagaan masyarakat	n/a	60
			Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap	100%	100%
			Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana	100%	100%
3	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	Presentase Wilayah Manajemen	n/a	20%

	Kebakaran dan Non-Kebakaran	Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran yang terbentuk		
			Presentase kejadian kebakaran dan Non Kebakaran yg ditindaklanjuti	n/a	100%

Capaian realisasi sesuai Dokumen Perencanaan 2025-2029 banyak yang tidak ada nilainya dikarenakan baru diukur pada tahun 2025 ini.

Secara keseluruhan telah terjadi peningkatan kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung *refocusing* prioritas pembangunan. Efisiensi tersebut berupa:

- penghematan listrik dan air dengan mematikan komputer/AC/lampu/dll saat tidak digunakan;
- memfokuskan program kegiatan pada kegiatan yang prioritas

Dari upaya tersebut, telah terjadi efisiensi sebesar Rp 242.172.570,00. Anggaran hasil dari Efisiensi Tersebut, Dialihkan Untuk Belanja Penanganan Kedaruratan Sebagai Upaya Mengoptimalkan Capaian Target Yang Menjadi Prioritas. Program Yang Mendukung Pencapaian Tersebut, Yaitu:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto akan melakukan beberapa rencana aksi, yaitu:

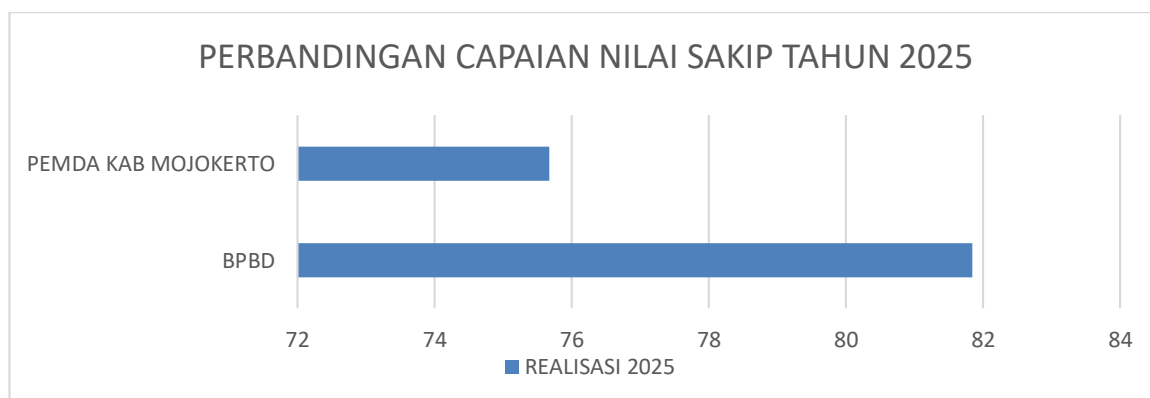
- memberikan *reward* khusus kepada bagian dengan capaian kinerja tertinggi
- memberikan *punishmen* kepada bagian dengan capaian kinerja terendah
- meningkatkan program peningkatan kualitas SDM sehingga pelayanan tetap prima
- mengadakan kebutuhan sarana parasarana prioritas guna mendukung pelayanan penanggulangan bencana di daerah.

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Dengan dukungan penguatan sistem perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja berbasis aplikasi di Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan hasil yang positif. Upaya tersebut mendorong peningkatan kinerja organisasi secara lebih terukur, sistematis, dan berorientasi pada hasil.

Hal tersebut tercermin dari Nilai SAKIP Tahun 2025 yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar 81,84. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja telah berjalan dengan baik dan berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan agar sejajar atau melampaui capaian pada level yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pemerintah daerah, Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto berada diatas Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar 75,67. Perbandingan ini menjadi indikator penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran capaian, serta pelaporan kinerja secara berkelanjutan.

Gambar III.1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2025



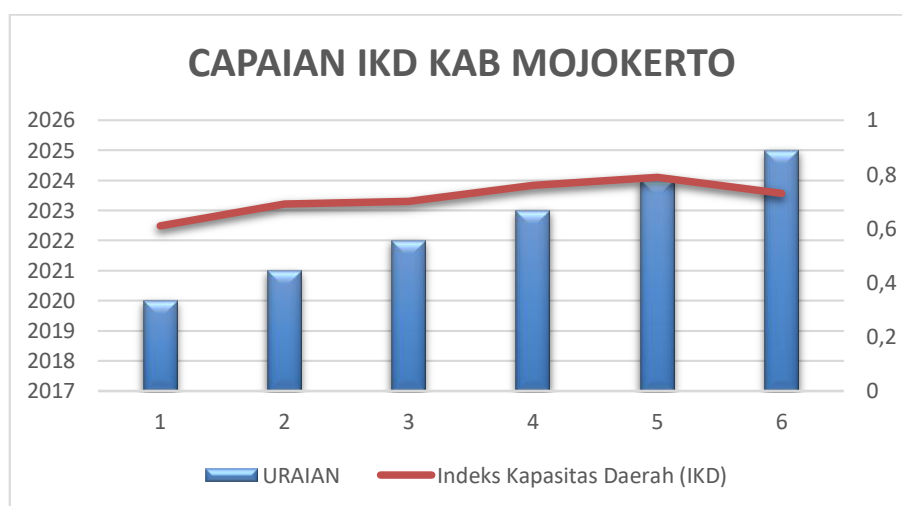
Gambar III.1 perbandingan nilai SAKIP 2025 menunjukkan bahwa nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto di atas nilai SAKIP Pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan

kategori memuaskan dan mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil .

Dengan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak di Kabupaten Mojokerto, Kapastias Penanggulangan Bencana di Kabupaten Mojokerto, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lebih baik, memadai, sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai Indeks Kapasitas Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendapatkan nilai 0,73.

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian, sebagai berikut:

Gambar III.2 Grafik Perbandingan Nilai IKD



Mulai tahun 2025, perhitungan Capaian IKD **dilakukan oleh Tim dari BNPB yang sebelumnya dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur**. Sedangkan BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun ini hanya memfasilitasi kelancaran pelaksanaannya saja atau **tidak lagi** mengeluarkan surat tentang Penyampaian Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Provinsi Jawa Timur yang bisa dijadikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai data dukung dalam pencapaian indikator IKD di Kabupaten/Kota.

Perbedaan perhitungan dikarena :

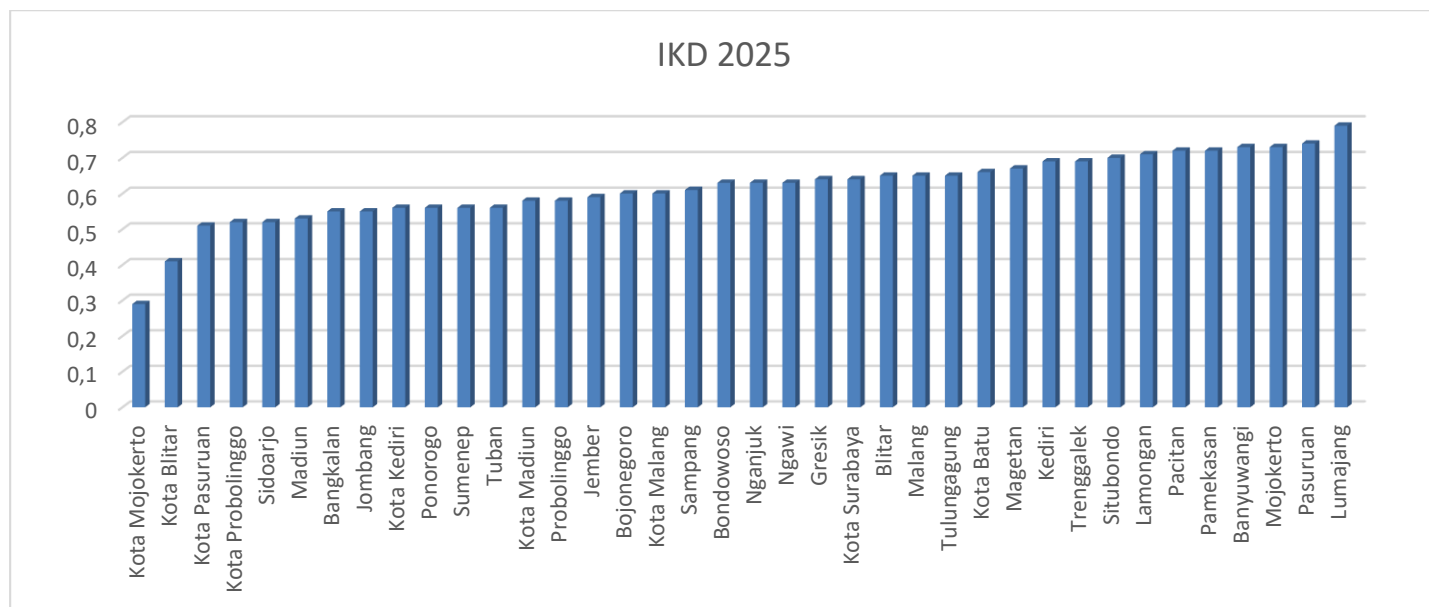
- **Hazard (Komponen bahaya)** : BPBD Provinsi Jawa Timur mengacu pada baseline data tahun 2021 sedangkan BNPB mengacu pada **baseline** IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011

- **Vulnerability (Komponen kerentanan):** BPBD Provinsi Jawa Timur mengacu pada baseline data tahun 2021 sedangkan BNPB mengacu pada **baseline** IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011 atau baseline 2021
- **Capacity (Komponen kapasitas):** dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan perangkat Penilaian IKD (71 Indikator) yang berbeda antara perhitungan BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB dikarenakan BNPB melakukan verifikasi ulang atas perhitungan yang sudah dilakukan BPBD Provinsi Jawa Timur bersama dengan BPBD Kabupaten/Kota. Nilai yang dirilis oleh BPBD Provinsi Jawa Timur adalah hasil kesepakatan perhitungan IKD dengan BPBD Kabupaten/Kota tidak menggunakan hasil rilis BNPB

Walaupun secara angka tahun 2025 ini lebih rendah dari tahun 2024 yang dikarenakan adanya perubahan skema penilaian IKD oleh BNPB yang sebelumnya hanya dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur tetapi pada riilnya nilai IKD di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 secara rilis BNPB adalah 0,71. Sehingga kalau dibandingkan secara peer to peer nilai IKD di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan yang semula dari 0,71 ke 0,73 di tahun ini.

Perbandingan realisasi kinerja Kabupaten dan Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Pusat



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Pusat
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,73	0,61	N/A

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai IKD Kabupaten Mojokerto merupakan 3 (tiga) besar terbaik di Provinsi Jawa Timur, hanya di bawah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Pasuruan. Realisasi Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto juga lebih tinggi dari Realisasi Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Provinsi Jawa Timur. Untuk perbandingan nilai IKD dengan Pusat belum bisa dibandingkan karena sampai dengan dokumen ini dibuat nilai IKD Pusat belum rilis.

Atas data diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sangat berkomitmen dalam penanggulangan bencana sehingga dapat berprestasi dengan memperoleh angka IKD 3 (tiga) besar terbaik se Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi kerentanan dan bahaya atas dampak bencana

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM dalam adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target SPM	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	100%	100%	100%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target SPM	Realisasi	Capaian
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%

Dari data diatas, pencapaian realisasi SPM sub urusan bencana dan kebakaran di Kabupaten Mojokerto adalah sesuai dengan rencana yang diharapkan. Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebesar Rp 11.200.200.325,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 10.708.200.247,00 atau sebesar 95.61% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.5 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.495.890.150	6.192.658.854	95%
2	Program Penanggulangan Bencana	3.176.593.275	3.027.707.040	95%
3	Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.527.716.900	1.487.834.353	97%

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai SPM	65%	63%	96,9%	1.527.716.900	1.487.834.353	97%
		Persentase Penanganan Non-Kebakaran sesuai Standar	100%	100%	100%			
2	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,62	0,73	117,7 %	3.176.593.275	3.027.707.040	95%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,45	81,84	100,5 %	6.495.890.150	6.192.658.854	95%
			Rata-rata capaian		103,78 %	Total capaian		96%

Berdasarkan Tabel III.5, capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,78%, yang berarti target kinerja telah terlampaui. Capaian tersebut didukung oleh realisasi anggaran sebesar 96% dari total alokasi anggaran yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan kinerja optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien. Dengan demikian, efisiensi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 4%, yang mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025. Pada awal Tahun Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Rencana Kinerja / Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja.

Pelaksanaan kinerja program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025 memiliki 2 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ke depan, perlu lebih menekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang, antara lain :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dengan melakukan inovasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
3. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran baik menyangkut prosedur/metode, standar pelayanan minimal, maupun sarana prasarananya.
4. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan.
5. Mengintensifkan konsultasi dan koordinasi dengan instansi penyelenggara penanggulangan bencana baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
6. Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga.
7. Meningkatkan anggaran yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan guna mencapai sasaran target kinerja yang telah ditetapkan.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mojokerto



Ir.Rinaldi Rizal Sabirin,S.T.,M.BA.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 197910102009011011

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H, M.Si.
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196802071988091001

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,825
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,10%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	81,14 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.049.199.000	APBD 2025
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.097.466.345	APBD 2025
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.560.600.000	APBD 2025

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. YO'IE AFRIDA SOSETYO DJATI, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196802071988091001

2. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Rinaldi Rizal Sabirin, S.T., M.BA.

Jabatan: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa

Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Pertama
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

Ir. Rinaldi Rizal Sabirin, S.T., M.BA.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 197910102009011011

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai SPM	65%
		Persentase Penanganan Non-Kebakaran sesuai Standar	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,62
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,45

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.495.890.150	PAPBD 2025
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 3.176.593.275	PAPBD 2025
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.527.716.900	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto


Ir. Rinaldi Rizal Sabirin, S.T., M.BA.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 197910102009011011

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3. Data E.81

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2025

No		Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran		Unit Perangkat Daerah			
		1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		23	R		11
					K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
1		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana		Indeks Kapasitas Daerah (IKD)(%)	0,61	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,73	-	0,00	-	120%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2			[PROGRAM] 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks kesiapsiagaan masyarakat(%)	60,00	3.176.593.275	0,00	670.955.700	0,00	141.471.790	0,00	1.006.800.621	60,00	1.208.478.929	60,00	3.027.707.040	100%	95%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap(%)	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100,00	-	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana(%)	65,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100,00	-	154%	0%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3			[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%)	100,00	136.559.000	0,00	5.034.900	0,00	4.020.450	0,00	97.283.578	100,00	21.753.502	100,00	128.092.430	100%	94%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun(Orang)	30,00	32.259.000	0,00	5.034.900	0,00	4.020.450	15,00	1.487.578	15,00	16.414.650	30,00	26.957.578	100%	84%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	104.300.000	0,00	-	0,00	-	1,00	95.796.000	0,00	5.338.852	1,00	101.134.852	100%	97%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3			[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDalops Penanggulangan Bencana(%)	100,00	1.435.884.150	0,00	329.528.000	0,00	62.730.340	0,00	418.114.146	100,00	564.981.882	100,00	1.375.354.368	100%	96%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani(kegiatan)	1,00	29.162.050	0,00	-	0,00	-	0,00	4.675.000	1,00	17.700.708	1,00	22.375.708	100%	77%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya(Unit)	2,00	515.081.000	2,00	133.703.500	0,00	5.281.288	0,00	-	0,00	372.350.568	2,00	511.335.356	100%	99%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota(Orang)	150,00	49.957.700	0,00	-	0,00	-	0,00	-	150,00	49.444.218	150,00	49.444.218	100%	99%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana(Kawasan)	2,00	93.526.300	2,00	79.668.400	0,00	4.982.728	0,00	3.553.500	0,00	1.991.518	2,00	90.196.146	100%	96%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana(Orang)	8,00	91.324.950	8,00	54.184.100	0,00	10.428.760	0,00	625.000	0,00	23.729.740	8,00	88.967.600	100%	97%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	113.121.000	0,00	-	0,00	-	1,00	104.377.846	0,00	-	1,00	104.377.846	100%	92%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya(laporan)	12,00	399.993.950	3,00	61.172.000	3,00	42.037.564	3,00	230.225.792	3,00	59.684.400	12,00	393.119.756	100%	98%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	58.748.750	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	36.610.730	1,00	36.610.730	100%	62%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(Kawasan)	100,00	84.968.450	0,00	800.000	0,00	-	100,00	74.657.008	0,00	3.470.000	100,00	78.927.008	100%	93%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3			[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%)	100,00	495.324.550	0,00	15.750.000	0,00	64.275.000	0,00	172.987.674	100,00	209.504.198	100,00	462.516.872	100%	93%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4			[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)	1,00	296.595.000	0,00	-	0,00	-	1,00	135.000.000	0,00	142.367.010	1,00	277.367.010	100%	94%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana(Orang)	100,00	57.189.250	60,00	15.750.000	5,00	8.865.000	5,00	15.538.200	30,00	13.907.770	100,00	53.860.970	100%	94%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis(Orang)	8,00	30.970.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,00	30.005.418	8,00	30.005.418	100%	97%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang)	30,00	88.319.250	0,00	-	30,00	55.610.000	0,00	22.449.474	0,00	3.775.000	30,00	81.834.474	100%	93%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota(Laporan)	1,00	22.251.050	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	19.449.000	1,00	19.449.000	100%	87%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan)	4,00	1.108.825.575	1,00	320.642.800	1,00	10.446.000	1,00	318.415.223	1,00	412.239.347	4,00	1.061.743.370	100%	96%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)(Orang)	100,00	112.079.275	100,00	96.522.300	0,00	1.360.000	0,00	4.704.512	0,00	3.732.070	100,00	106.318.882	100%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0014 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalakan(kegiatan)	1,00	514.244.300	1,00	211.030.500	0,00	680.000	0,00	300.572.108	0,00	-	1,00	512.282.608	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	300.980.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	278.395.961	1,00	278.395.961	100%	92%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	181.522.000	0,00	13.090.000	0,00	8.406.000	0,00	13.138.603	1,00	130.111.316	1,00	164.745.919	100%	91%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Nilai SAKIP perangkat Daerah(nilai)	81,30	6.495.890.150	0,00	-	0,00	-	0,00	-	81,40	6.192.658.854	81,40	6.192.658.854	100%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2		[PROGRAM] 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM(nilai)	90,00	6.495.890.150	0,00	1.493.772.770	0,00	1.684.480.659	0,00	1.405.493.586	91,00	1.608.911.839	91,00	6.192.658.854	101%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3		[KEGIATAN] 1.05.01.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah(%)	100,00	8.800.000	0,00	700.000	0,00	800.000	0,00	1.600.000	99,00	5.300.000	99,00	8.400.000	99%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	3,00	4.400.000	1,00	400.000	1,00	600.000	1,00	1.000.000	0,00	2.275.000	3,00	4.275.000	100%	97%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	3,00	4.400.000	1,00	300.000	1,00	200.000	1,00	600.000	0,00	3.025.000	3,00	4.125.000	100%	94%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	89,00	5.664.083.000	0,00	1.281.292.965	0,00	1.536.654.010	0,00	1.212.973.067	94,00	1.371.633.821	94,00	5.402.553.863	106%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	44,00	5.664.083.000	44,00	1.281.292.965	0,00	1.536.654.010	0,00	1.212.973.067	0,00	1.371.633.821	44,00	5.402.553.863	100%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN(%)	81,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	85,00	-	85,00	-	105%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)	100,00	246.181.175	0,00	83.639.696	0,00	42.495.152	0,00	46.051.564	100,00	72.498.317	100,00	244.684.729	100%	99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00	6.089.375	0,00	-	1,00	-	0,00	6.002.228	0,00	-	1,00	6.002.228	100%	99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	2,00	71.799.700	0,00	-	2,00	32.910.000	0,00	580.000	0,00	37.912.217	2,00	71.402.217	100%	99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00	44.998.200	1,00	3.557.500	0,00	-	0,00	14.331.268	0,00	26.942.500	1,00	44.831.268	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1,00	32.000.000	1,00	19.470.800	0,00	1.680.000	0,00	5.827.568	0,00	4.918.400	1,00	31.896.768	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)	12,00	6.359.400	3,00	1.560.000	3,00	582.000	3,00	1.080.000	3,00	2.725.200	12,00	5.947.200	100%	94%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1,00	35.000.000	1,00	34.862.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	34.862.500	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12,00	49.934.500	3,00	24.188.896	3,00	7.323.152	3,00	18.230.500	3,00	-	12,00	49.742.548	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100,00	-	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(bulan)	12,00	294.056.425	3,00	60.323.278	3,00	63.561.487	3,00	73.057.598	3,00	71.255.593	12,00	268.197.956	100%	91%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12,00	149.974.700	3,00	33.760.798	3,00	32.237.371	3,00	30.863.720	3,00	29.056.813	12,00	125.918.702	100%	84%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12,00	144.081.725	3,00	26.562.480	3,00	31.324.116	3,00	42.193.878	3,00	42.198.780	12,00	142.279.254	100%	99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah(bulan)	12,00	282.769.550	3,00	67.816.831	3,00	40.970.010	3,00	71.811.357	3,00	88.224.108	12,00	268.822.306	100%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	26,00	219.993.900	5,00	53.566.831	7,00	37.470.010	8,00	63.932.357	6,00	51.680.322	26,00	206.649.520	100%	94%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	2,00	35.278.250	2,00	10.475.000	0,00	-	0,00	1.634.000	0,00	22.673.786	2,00	34.782.786	100%	99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	27,00	27.497.400	5,00	3.775.000	8,00	3.500.000	9,00	6.245.000	5,00	13.870.000	27,00	27.390.000	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai SPM,	65,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	64,00	-	98%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Penanganan Non-Kebakaran Sesuai Standar	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2		[PROGRAM] 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk (%)	20,00	1.527.716.900	0,00	133.652.110	0,00	226.918.854	0,00	164.142.049	20,00	963.121.340	20,00	1.487.834.353	100%	97%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase kejadian kebakaran dan Non Kebakaran yg ditindakanjuti (%)	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100,00	-	100%		
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran(%)	100,00	1.464.982.700	0,00	133.652.110	0,00	226.918.854	0,00	163.742.049	100,00	904.756.034	100,00	1.429.069.047	100%	98%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)	12,00	149.994.700	3,00	25.772.110	3,00	28.090.028	3,00	23.466.163	3,00	58.144.056	12,00	135.472.357	100%	90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran(Dokumen)	12,00	689.400.000	3,00	107.880.000	3,00	174.092.398	3,00	137.095.886	3,00	267.295.676	12,00	686.363.960	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran(Orang)	45,00	24.988.000	0,00	-	22,00	14.661.128	10,00	-	13,00	8.982.000	45,00	23.643.128	100%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait(Unit)	6,00	600.600.000	0,00	-	0,00	10.075.300	0,00	3.180.000	6,00	570.334.302	6,00	583.589.602	100%	97%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran(%)	100,00	10.370.000	0,00	-	0,00	-	0,00	400.000	100,00	8.513.818	100,00	8.913.818	100%	86%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran(Dokumen)	1,00	10.370.000	0,00	-	0,00	-	0,00	400.000	1,00	8.513.818	1,00	8.913.818	100%	86%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran(%)	100,00	52.364.200	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	49.851.488	100,00	49.851.488	100%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4	(SUB KEGIATAN) 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya(Desa/Kelurahan)	2,00	52.364.200	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	49.851.488	2,00	49.851.488	100%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
[Target Capaian Sub Kegiatan]													100.00 %	18.251.448.680			
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3		Triwulan 4												
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan proyeksi anggaran kas	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan proyeksi anggaran kas	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan proyeksi anggaran kas	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan proyeksi anggaran kas													
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	anggaran APBD yang tidak sesuai dengan usulan kebutuhan anggaran kegiatan yang telah disusun	anggaran APBD yang tidak sesuai dengan usulan kebutuhan anggaran kegiatan yang telah disusun	anggaran APBD yang tidak sesuai dengan usulan kebutuhan anggaran kegiatan yang telah disusun	anggaran APBD yang tidak sesuai dengan usulan kebutuhan anggaran kegiatan yang telah disusun													
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	kegiatan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas yang sudah di tetapkan	1. Masih adanya kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 dan TW 2, agar kegiatan dapat di laksanakan pada TW 3;	kegiatan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas yang sudah di tetapkan	kegiatan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas yang sudah di tetapkan													
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	1. Target kinerja dan Anggaran Kas di sesuaikan dengan mengacu dengan Renstra 2025-2029;	1. Target kinerja dan Anggaran Kas di sesuaikan dengan mengacu dengan Renstra 2025-2029;	1. Target kinerja dan Anggaran Kas di sesuaikan dengan mengacu dengan Renstra 2025-2029;	1. Target kinerja dan Anggaran Kas di sesuaikan dengan mengacu dengan Renstra 2025-2029;													

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".